

**General View of
Modern Education Problems in Indonesia**
(*Tinjauan Umum Problematika Pendidikan Modern di Indonesia*)

Norhasan, M.Pd
Universitas Kanjuruhan Malang

Abstract:

The modern era has undergone many problems for the educational institutions. The problems are not only about the concept, regulation and budgeting but they are also regarding to the implementation of any kinds of education system in Indonesia. Some people say that the output of our education does not satisfy their demand of national education purpose.

The morality and work ethic are still low. The corruption rate is increasing and increasing. In addition, it is said that the employment in this country is also adding. This condition makes us sad to face. Some say, there's something wrong in our education institution and it needs better improving and developing. This paper is pretended to analyse the modern education problems and the factors causing to make problems. In this paper, the writer would like to give the way out to overcome the modern education problems.

(Era kehidupan modern telah banyak menimbulkan berbagai problematika bagi dunia pendidikan. Problematika tersebut tidak hanya menyangkut persoalan konsep, berbagai peraturan, dan anggaran, tetapi juga menyangkut persoalan pelaksanaan dari berbagai sistem pendidikan di Indonesia. Tak sedikit kalangan menilai bahwa out put pendidikan kita masi jauh dari cita-cita yang diharapkan. Kehidupan moral, etos kerja, kemampuan dan keterampilan yang masih rendah, angka korupsi yang terus bertambah, serta banyaknya pengangguran di negara kita ini. Hal inilah yang membuat keprihatinan bagi beberapa kalangan yang sempat mencurahkan perhatiannya dalam dunia pendidikan. Mereka melihat bahwa telah ada yang salah dalam pendidikan kita. Hingga perlu adanya perbaikan secara menyeluruh terhadap masalah pendidikan. Dalam kontek modern, segala bentuk pendidikan pasti mengalami problem. Hampir mustahil,tidak ada kegiatan pendidikan yang berjalan mulus tanpa adanya problem. Justru ketidakadaan problem itu sendiri adalah problem. Paper ini berpretensi untuk menganalisis problematika pendidikan modern, dan kemungkinan aspek pendidikan modern yang mengalami problem. Di dalam paper ini juga, penulis mencoba menjelaskan faktor-kator penyebab terjadinya problematika pendidikan modern serta berusaha memberikan jalan keluar pemecahan problematika pendidikan modern tersebut).

Pendahuluan

Kehidupan modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, ternyata telah melahirkan dampak yang luar biasa dalam aspek kehidupan. Di satu sisi kehidupan modern telah berhasil menunjukkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang spektakuler, namun di sisi lainnya pada saat yang bersamaan ia telah menimbulkan berbagai masalah kemanusiaan yang sangat mengkhawatirkan berupa krisis moral yang luar biasa. Semua gejala itu timbul akibat derasnya pengaruh sekularisme yang tak terbendung. Kehidupan masyarakat telah didominasi oleh rasionalisasi materialistis yang sarat dengan berbagai kepentingan serta menumbuhkan sikap hedonisme materialistik yang luas di masyarakat.

Era kehidupan modern ini juga menimbulkan berbagai problematika bagi dunia pendidikan. Problematika tersebut tidak hanya menyangkut persoalan konsep, berbagai peraturan, dan anggaran, tetapi juga menyangkut persoalan pelaksanaan dari berbagai sistem pendidikan di Indonesia. Sejak bergulirnya era reformasi banyak kalangan terperanjat terhadap problem pendidikan ini. Hal ini bermula dari penilaian banyak orang terhadap *out put* hasil pendidikan yang belum sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Kehidupan moral, etos kerja, kemampuan dan keterampilan yang masih rendah, angka korupsi yang terus bertambah, serta banyaknya pengangguran di negara kita ini. Hal inilah yang membuat keprihatinan bagi beberapa kalangan yang sempat mencurahkan perhatiannya dalam dunia pendidikan. Mereka melihat bahwa telah ada yang salah dalam pendidikan kita. Hingga perlu adanya perbaikan secara menyeluruh terhadap masalah pendidikan.

Dalam konteks modern, segala bentuk pendidikan pasti mengalami problem. Hampir mustahil, tidak ada kegiatan pendidikan yang berjalan mulus tanpa adanya problem. Justru ketidakadaan problem itu sendiri adalah problem. Oleh karena setiap kegiatan pendidikan itu punya problematika tersendiri maka kita berupaya semaksimal mungkin agar problematika tersebut dapat diminimalisir dan dipecahkan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis

berusaha memberikan *way out* atau jalan keluar pemecahan problematika pendidikan yang penulis tuangkan dalam paper ini.

Paper ini berpretensi untuk menganalisis problematika pendidikan modern, dan kemungkinan aspek pendidikan modern yang mengalami problem. Di dalam paper ini juga, penulis mencoba menjelaskan faktor-kator penyebab terjadinya problematika pendidikan modern serta berusaha memberikan jalan keluar pemecahan problematika pendidikan modern tersebut.

Pengertian problematika pendidikan modern

Untuk menghindari misinterpretasi tentang makna problematika pendidikan modern, perlu penulis jelaskan definisi dari istilah-istilah tersebut. Istilah problematika pendidikan modern terdiri dari dari tiga kata,yaitu problematika, pendidikan dan modern.

Istilah problematika mempunyai padanan kata dengan kata *problem* yang artinya soal,masalah atau persoalan.¹ Pendidikan dapat diartikan sebagai proses mengembangkan,mengasuh, atau mengolah sesuatu secara berkelanjutan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.² Menurut Richard Pring pendidikan adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk mengolah pikiran (mind) ke arah kebaikan serta mengembangkan kebajikan (virtue).³ Sementara modern dapat didefinisikan sebagai proses pergerakan sikap dan mentalitas serta sudut pandang masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan masa.⁴

Dari definisi-definisi di atas menurut penulis yang dimaksud dengan problematika pendidikan modern adalah persoalan atau masalah yang berkaitan dengan upaya pengolahan,pengasuhan dan pengembangan manusia ke arah yang lebih baik yang sesuai dengan tuntutan zaman.

¹ Departemen Pendidikan Nasional ,*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* ,(Jakarta:Balai Pustaka),hal.1103

² John Dewey ,*Democracy and education* (New York: The Free Press,1966), hal.10

³ Richard Pring, *Philosopy of Education, Aims,Theory, Common Sense and Reseach*, (New York: Continuum,2004),hal.44

⁴ Departemen Pendidikan Nasional ... ,hal.582

Kemungkinan aspek pendidikan modern yang mengalami problem

Pendidikan (*education*) merupakan salah satu term yang tidak pernah habis dan selalu hangat untuk diperbincangkan. Karena selama manusia ada, perbincangan tentang pendidikan akan selalu eksis di dunia. Pendidikan merupakan hal penting bagi kehidupan manusia sebagai sarana kesuksesan dunia.⁵ Melalui pendidikan manusia dapat melakukan perubahan serta perkembangan kehidupannya.⁶

Dengan pendidikan pula manusia bisa belajar menghadapi dan menaklukkan alam semesta dalam rangka mempertahankan kehidupannya.⁷ Manusia sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Karena itu, pendidikan tidak akan terlepas dari permasalahan. Setiap kegiatan pendidikan bisa dipastikan mengalami problematika.

Secara umum, menurut Suparlan Suhartono, dalam konteks pendidikan modern, setidaknya ada dua aspek yang menimbulkan problema, yaitu *financial aspect* (aspek yang berkaitan dengan pembiayaan) dan *morality aspect* (aspek yang berkaitan dengan moral).⁸ Untuk lebih jelasnya, kedua aspek tersebut dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Aspek Pembiayaan (Financial Aspect)

Pendidikan di Indonesia saat ini mengalami problem yang cukup pelik. Salah satu dari sekian problem tersebut adalah aspek pembiayaan (financial problem). Biaya pendidikan itu mahal.⁹ Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini yang sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku kuliah. Mahalnya biaya kuliah ini membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak

⁵ Charlen Tan, *Philosophical Reflections for educators*, (Singapore: Cengage Learning Asia), hal.15

⁶ Suparlan Suhartono, *Wawasan Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2008), hal.41

⁷ Hanun. Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2001) hal.2

⁸ Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2007), hal.70

⁹ <http://edukasi.kompasiana.com/2010/10/10/perkembangan-dan-masalah-pendidikan-di-masyarakat-indonesia/diakses> pada tanggal 1 Oktober 2011

bersekolah. Sehingga banyak kalangan menilai bahwa pendidikan telah dikomersilkan. Kenapa begitu?

Dunia pendidikan telah dirasuki oleh moralitas kapitalisme hedonistic. Ketika dunia pendidikan telah kerasukan moralitas kapitalisme hedonistik, maka orientasi pendidikan pun bergeser ke arah titik kenikmatan ekonomi material. Dan pergeseran orientasi pendidikan seperti ini mendorong penyelenggaraan pendidikan cenderung komersial.¹⁰ Akibatnya, keluarga mengharapkan putera-puterinya menjadi dokter, insinyur, pejabat, konglomerat dan sebagainya. Karena profesi yang seperti itulah yang paling dekat dengan perolehan “uang” atau materi yang sebanyak-banyaknya.¹¹ Sementara bila menjadi orang yang bermoral, beriman, saleh, dan sebagainya sudah tidak populer lagi, karena jauh dari uang dan materi yang banyak.

2. Aspek moralitas (*morality aspect*)

Di tengah usaha serius pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita pendidikan, kini dunia pendidikan kita mengalami problem yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Pada saat ini, pendidikan kita tertampar dengan berbagai kasus yang memalukan yang dilakukan oleh para elit politik, birokrat dan bahkan penegak hukum. Tidak sedikit anggota DPR melakukan korupsi, menteri, bupati, dan pejabat Negara yang dipenjara, aparat pajak mengemplang dana pajak masyarakat, dan para penegak hukum yang terjerat kasus hukum, mereka itu adalah orang-orang terpelajar, hasil pendidikan sekolah dan Perguruan Tinggi Indonesia.¹²

Negara ini telah menjadi negara yang korup. Menurut Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, pada tahun 2002 APBN di Negara Indonesia dikorup sekitar 20 persen. Berarti 20 persen dari Rp. 327,1 triliun, yang dikorup sekitar Rp. 65

¹⁰ Suparlan Suhartono, ... hal.28

¹¹ Suparlan Suhartono, ... hal.28

¹² Ali Modlofir, “Pendidikan Karakter Melalui Penanaman Etika Berkomunikasi Dalam Al-Qur’an, Jurnal *Islamica*, Volume 5, nomor 2 (Maret 2011), hal.167

triliun.¹³ Jika pada tahun 2002 saja negara sudah mengalami kerugian Rp.65 triliun,bagaimana dengan saat ini!?

Dalam perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun terjadi kecurangan. Untuk dapat lolos tes, calon PNS harus menyediakan uang sekitar Rp. 100 juta hingga Rp.15 0 juta. Kondisi ini merupakan hasil kerja sama antara calon PNS dan Petugas Seleksi CPNS yang tergiur dengan uang suap.¹⁴ Sehingga tidak ayal kalau pada tahun 2010, menurut survey *Political and Economic Risk Consultancy* , Indonesia menjadi pemegang rekor sebagai Negara terkorup pertama di Asia-Pasifik dengan skor 9,07.¹⁵

Hingga saat ini aksi korupsi masih sulit dimusnahkan. Terbukti menurut data Jaringan Kerja Anti korupsi Jatim dan Malang Corruption Watch (MWC) menyebutkan mental korupsi belum menunjukkan tanda perbaikan signifikan. Bahkan menurut mereka makin memburuk. Hasil *review* kasus korupsi yang masuk di Pengadilan Negeri menampakan kecenderungan yang terus meningkat dan memberi dampak kerugian besar. Menurut mereka, kerugian akibat korupsi di Jatim dalam tiga tahun terakhir meliputi: kerugian Negara mencapai Rp. 1,3 triliun di tahun 2010, Pada tahun 2012 jumlahnya naik menjadi Rp. 1,4 triliun. Sedangkan pada tahun 2013, mulai Januari hingga Juli saja, nilai kerugian Negara sudah mencapai Rp. 1,1 triliun.¹⁶

Disamping maraknya aksi korupsi,yang sangat menyedihkan lagi, tidak sedikit pelajar Indonesia melakukan tindakan asusila atau amoral. Di Jawa Barat,misalnya, beberapa siswa SMA 2 Cianjur melakukan *oral sex* di dalam kelas ketika sekolah dalam kondisi sepi.¹⁷ Di Pamekasan, setelah dinyatakan lulus UN 2011, ada siswi SMAN 1 Pamekasan yang berani melakukan *half-naked*

¹³ Mundzar Fahman, *Kiai dan Korupsi: Andil Rakyat, Kiai dan Pejabat dalam korupsi* (Surabaya: Jawa Pos Press, 2004), hal.27

¹⁴ Ibid...,hal.44

¹⁵ Jabir Alfaruqi, “Sempurnalah Korupsi di Indonesia” *Jawa Timur Pos* (10 Maret 2010) dalam Kliping Artikel dan Surat Kabar Edisi Maret 2010 (Surabaya: Perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), hal.15

¹⁶ Joko Susanto, “Menstimulasi Jatim Minim Korupsi” *Jawa Timur Pos* (27 Desember 2010), 42.

¹⁷ As’aril Muhajir,*Ilmu Pendidikan,Perspektif Kontekstual* (Jogyakarta:Ar-ruzz Media,2011),hal.36

(separuh telanjang) di depan teman-temannya dengan cara melepas jilbab, membuka sebagian pakaian hingga setengah telanjang.¹⁸ Menurut pandangan penulis, problem di atas terjadi karena kurangnya nilai-nilai moral dan akhlakul karimah yang mereka miliki. Mereka telah mengalami krisis *akhlakul karimah* dalam diri mereka.

Faktor Penyebab Terjadinya Problematika Pendidikan Modern

3. Dunia pendidikan telah kerasukan kapitalisme

Diantara sekian banyak faktor penyebab terjadinya problematika pendidikan modern adalah adanya pengaruh kapitalisme. Watak dari perekonomian material-kapitalistik ini melekat dari mulai titik kebijakan hingga dalam praktik penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Tidak jarang kita justru setuju dengan bentuk pemahalan pendidikan dengan alibi bahwa pendidikan butuh kualitas (*education needs quality*) dan kualitas membutuhkan biaya.

Memang benar bahwa membangun kualitas membutuhkan biaya. Tidak ada yang ragu akan hal itu. Persoalannya kemudian apakah dengan demikian otomatis biaya itu dibebankan kepada rakyat/warga negara ?. Mayoritas penduduk Indonesia adalah miskin. Sebagai perenungan. Di UGM biaya mengikuti jalur khusus dari Rp 15 juta sampai Rp 150 juta. Mungkinkah anak-anak yang setiap hari kita temukan mengemis dipinggir jalan mampu membayar biaya pendidikan sebesar itu ? Jangankan membayar biaya demikian besar, untuk makan sehari saja mereka pontang-panting mencari uang. Tidak hanya satu dua orang, jumlah orang miskin seperti ini jutaan jumlahnya di negeri ini.

Undang-undang pun muncul sebagai tameng untuk melegalkan praktik kapitalisasi pendidikan yang menjadikan pendidikan laiknya barang dagangan yang hanya bisa diperoleh bagi mereka yang berduit. Naifnya, justru semangatnya berseberangan dengan spirit UUD '45 yang berada jauh di atasnya. Pasal 24 ayat (3) UU No.20/2003 tentang Sisdiknas misalnya menandakan bahwa dana

¹⁸ Radar Madura, 29 Mei 2011.

pengembangan pendidikan bisa diperoleh melalui masyarakat yang pengelolaannya berdasarkan akuntabilitas. Rakyat masih diberikan porsi beban menanggung biaya sementara negara tidak disebutkan secara tegas akan tanggung-jawabnya atas pendidikan rakyat.¹⁹

Dalam logika dagang, tentu ada penanam modal (investor), ada laba (modal) dan ada yang dijual (komoditas) dan yang terutama adalah sudah barang tentu di dalamnya ada keuntungan pribadi. Begitulah yang terjadi dengan pendidikan di negeri kita sekarang. Ilmu pengetahuan yang seharusnya dapat dinikmati secara gratis oleh rakyat untuk kemajuan negara justru tidak dapat dinikmati. Walhasil, negara Indonesia tetap akan menjadi negara rapuh, bodoh dan lemah. Sementara pendidikan di negara-negara maju tidak hanya sistem mereka yang bagus tetapi juga memberikan ruang yang lebar kepada rakyatnya untuk mengakses pendidikan. Pertanyaannya, untuk apa pendidikan berkualitas jika seluruh rakyat tidak dapat mengenyam pendidikan yang seharusnya menjadi hak mereka ?

Disini pendidikan berubah dilihat sebagai komoditas yang mendatangkan keuntungan modal (uang). Perlu diketahui, pergeseran kecenderungan pendidikan dalam bentuk pemahalan merupakan bagian dari dampak globalisasi ekonomi yang ditandai dengan pelepasan peran negara dalam mencampuri urusan yang berkenaan dengan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui kesepakatan *General Agreement on Tarrif and Trade* (GATT). Karena pendidikan dilihat sebagai komoditas ekonomi, maka peran negara dalam mengurus biaya pendidikan harus dilepaskan.²⁰ Artinya, biarkan biaya pendidikan ditentukan sesuai kehendak swasta. Inilah yang menyemangati perubahan status di beberapa perguruan tinggi seperti UGM, UI, ITB, dan IPB, dari BUMN menjadi BHMN. Negara tidak perlu mensubsidi lagi.

4. Destruksi nilai dan moral

¹⁹ Zainuddin Syarif, *Problem Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 154

²⁰ Ibid, ... 155

Disamping adanya pengaruh kapitalisme, yang faktor penyebab terjadinya problematika pendidikan modern adalah adanya destruksi nilai dan moral. Pendidikan nilai dan moral kurang begitu diperhatikan. Padahal pendidikan nilai ini sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk menyadarkan peserta didik agar mampu menimbang kebenaran, kebaikan, dan keindahan serta mampu mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam bentuk tindakan secara konsisten. Sementara itu, pendidikan moral bertujuan agar peserta didik memiliki ukuran abilitas moral (moralitas) yang lebih matang serta mampu merefleksikannya dalam tindakan terpuji.²¹

Nilai baik-buruk atau nilai etika merupakan nilai perekat kesamaan antara pendidikan nilai dan pendidikan moral. Namun secara umum, tujuan akhir dari dua jenis pendidikan tersebut sama, yaitu membentuk kepribadian peserta didik agar lebih sehat, matang, mandiri, serta memiliki sifat-sifat yang baik dan mulia yang dapat berguna bagi diri dan lingkungannya; baik lingkungan alam, maupun lingkungan masyarakatnya.²²

Jalan Keluar Untuk Memecahkan Problematika Pendidikan Modern

5. Menciptakan pendidikan berbasis kerakyatan

Seperti dipaparkan di atas bahwa problem pendidikan modern adalah terkait dengan *financial problem*. Untuk mengatasi persoalan tersebut, penulis menawarkan adanya pendidikan berbasis kerakyatan. Pendidikan yang dapat memberikan kesempatan kepada semua warga negara Indonesia untuk mengenyamnya. Pemerintah harus menjamin seratus persen (100%) rakyatnya agar dapat mengenyam pendidikan secara murah. Artinya, pendidikan itu harus dibiayai oleh negara. Kita patut bersyukur rupanya pemerintah telah peduli dengan hak pendidikan warga negaranya dengan memberikan pendidikan gratis melalui program BOS (biaya operasional sekolah). Walaupun program BOS tersebut hanya bagi siswa-siswa sekolah dasar (SD, MI) dan menengah

²¹ Ahmad Fauzan, *Hasanah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), hal. 85

²² Ibid...hal. 86

(SMP,MTs),bukan untuk siswa-siswa tingkat atas (SMU,MA) apalagi mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Kita berharap kedepan pemerintah akan membuat kebijakan bahwa pendidikan dibiayai oleh negara sehingga semua warga negara dapat menikmati pendidikan dengan baik.

6. Memperkuat pendidikan nilai dan moral

Untuk mengatasi problem krisis nilai dan moral menurut hemat penulis, kurikulum pendidikan kita dititikberatkan pada bagaimana mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan pembentukan moral anak didik yang baik. Dalam arti kata, pendidikan nilai dan moral perlu mendapatkan *stressing* khusus dan menjadi keunggulan di sekolah.

Pembelajaran nilai-moral mulai banyak dibicarakan seiring dengan upaya restrukturisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke kurikulum 2013. Kurikulum 2013 secara eksplisit menyatakan perlunya dikembangkan pendidikan nilai dan moral sebagai alternatif, semangat yang mendorong perubahan kurikulum yang menyiratkan pentingnya perluasan pembelajaran kearah yang lebih bermakna agar pendidikan tidak hanya semata-mata mengembangkan kemampuan akademis.

Proses pendidikan, menurut Amin Jakfar, diupayakan agar peserta didik mampu belajar untuk tahu (*learning to know*), belajar untuk berbuat (*learning to do*), dan belajar untuk menjadi dirinya sendiri (*learning to be*). Dalam arti kata, kemampuan peserta didik diharapkan tidak hanya bertumpu pada perkembangan intelektual semata, tetapi juga mereka diharapkan mampu mengembangkan keterampilan bertindak dan secara konsisten menjadikan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai sebagai bagian dari kehidupan pribadi siswa yang menyatu.²³

Harapan yang terkandung dalam kurikulum saat ini pada dasarnya menekankan pentingnya proses pembelajaran yang kaya makna. Belajar mengetahui mengandung arti bahwa pengetahuan bukan sesuatu yang diperoleh

²³ Amin Jakfar, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Media Ilmu,2003),hal.49.

dari hasil pemberian, melainkan sesuatu yang diusahakan secara eksploratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.²⁴ Begitu juga, belajar berbuat dan belajar menjadi diri sendiri merupakan dua sisi proses belajar yang dapat memperkaya perolehan makna kehidupan. Berbuat atau bertindak atas dasar sesuatu yang diketahui dapat semakin menegaskan eksistensi pengetahuan dan dapat membuka pengetahuan dan pengalaman baru, sedangkan perbuatan/tindakan yang dilakukan secara cermat dan konsisten dapat berfungsi sebagai proses pembelajaran untuk menjadi diri sendiri yang lebih matang dan dewasa.

Pada rentang pembelajaran inilah sesungguhnya nilai dan moral selalu dilibatkan. Nilai dirasakan kalau ada makna dalam pembelajaran yang terkait langsung dengan realitas kehidupan, sedangkan moral berperan sebagai penimbang nilai baik-buruk tindakan. Istilah nilai memiliki arti yang lebih luas daripada moral, karena nilai mencakup juga kemampuan peserta didik dalam menimbang benar-salah (logis) dan indah-tidak indah (estetis), yang dua hal ini berada di luar wilayah kajian moral-etik.

Dengan kata lain, pendidikan nilai dan pendidikan moral tidak selalu identik ketika pendidikan nilai dianggap sebagai keseluruhan pembelajaran nilai (etika, logika, dan estetika). Dua jenis pendidikan itu dapat dianggap identik jika pendidikan nilai dipersepsi sebagai pengembangan afektif yang sangat erat kaitannya dengan pengembangan moral.

Penutup

Dalam konteks pendidikan modern, setidaknya ada dua aspek yang menimbulkan problema, yaitu *financial aspect* (aspek yang berkaitan dengan pembiayaan) dan *morality aspect* (aspek yang berkaitan dengan moral). Problem yang pertama faktor penyebabnya adalah adanya pengaruh kapitalisme. Sedangkan *morality aspect* disebabkan destruksi nilai dan moral. Untuk mengatasi persoalan

²⁴ Ibid., hal.53.

yang pertama, penulis menawarkan adanya pendidikan berpihak kepada rakyat. Dimana pendidikan itu dapat memberikan kesempatan kepada semua warga negara Indonesia untuk mengenyamnya. Dan untuk mengatasi problem krisis nilai dan moral menurut hemat penulis, kurikulum pendidikan kita dititikberatkan pada bagaimana mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan pembentukan moral anak didik yang baik. Dalam arti kata, pendidikan nilai dan moral perlu mendapatkan *stressing* khusus dan menjadi keunggulan di sekolah.

Daftar Pustaka

Ali Modlofir, "Pendidikan Karakter Melalui Penanaman Etika Berkomunikasi Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Islamica*, Volume 5, nomor 2 (Maret 2011)

As'aril Muhajir, *Ilmu Pendidikan, Perspektif Kontekstual* (Jogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011)

Ahmad Fauzan, *Hasanah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009)

Charlen Tan, *Philosophical Reflections for educators*, (Singapore: Cengage Learning Asia)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka)

Hanun. Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2001)

John Dewey, *Democracy and education* (New York: The Free Press, 1966)

Richard Pring, *Philosophy of Education, Aims, Theory, Common Sense and Reseach*, (New York: Continuum, 2004)

Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2007)

-----, *Wawasan Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2008)

Jabir Alfaruqi, "Sempurnalah Korupsi di Indonesia" *Jawa Timur Pos* (10 Maret 2010) dalam Kliping Artikel dan Surat Kabar Edisi Maret 2010 (Surabaya: Perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

Joko Susanto, “Menstimulasi Jatim Minim Korupsi” *Jawa Timur Pos* (27 Desember 2010)

Mundzar Fahman, *Kiai dan Korupsi: Andil Rakyat, Kiai dan Pejabat dalam korupsi* (Surabaya: Jawa Pos Press, 2004)

Zainuddin Syarif, *Problem Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

Radar Madura, 29 Mei 2011.

<http://edukasi.kompasiana.com/2010/10/10/perkembangan-dan-masalah-pendidikan-di-masyarakat-indonesia/diakses> pada tanggal 1 Oktober 2011